

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1983.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa kreatif, Malang, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum pidana, bag.2, penafsiran hukum pidana dasar peniadaan, pemberatan, dan peringanan pidana, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas*, Raja Gradindo Persada, 2002, Jakarta
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Halim, M., *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Press, Jakarta, 2009
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Magnis-Suseno, Frans, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta, Gramedia, 2016. Mansyur, M. Arif dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Atmajaya Pres, Yogyakarta, 2004
- Muhtaj, Majda El., *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Projodikoro, Wiryono, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime: pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.
- Widnyana, I Made, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

W, Supriyadi Edi, *et. al.*, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2012.

JURNAL

- Afifah, Wiwik, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19.
- Amoi, Novia Fetrisna,. Erny Herlin Setyorini, *Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Ardianto, Suryo, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam Pemberitaan Pencemaran Nama Baik*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008
- Endro Purwoleksono, Didik, *Diktat Hukum Telematika*, FH Universitas Airlangga, Surabaya, 2017
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2013.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Kleden, Kristoforus Laga, *Pendekatan Viktiminologi Meminimalisir Disparatis Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2019 Volume 2, Nomor 2.
- Muabezi, Zahermann Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, Jakarta.
- Nurhadini Kristini, *Tindak Pidana Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Peghinaan Dan Pencemaran Nama Baik*, Tesis, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2009.
- Pujayanti, Nur,. Harry Soeskandi, *Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri*, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018.

Rizaldi, Muhammad, *Anotasi Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)*, MaPPI – FHUI, Jakarta, 2015

Saputra, Alvin,. Ahmad Mahyani, *Tinjauan Yuridis Tradisi In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2017

Subaskoro, *Pertanggungjawaban Pidana Media Cetak Sebagai Akibat pemberitaan pers yang berindikasi pencemaran nama baik*. Skripsi FH Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun, 2017.

Tim Elsam, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet*, ELSAM, Jakarta, 2013.

Yudianto, Otto, *Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No 23, 2016.

WEBSITE

<http://www.suduthukum.com/2016/11/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam.html>

www.wikipedia.com

www.merriam-webster.com

www.dialektikahukum.blogspot.com

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 50/PUU-VI/2008.